

## Kajian Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Ketapang Indah

Study of Community Participation in Village Development Planning in Village  
Ketapang Indah

<sup>1</sup>Yoppi Yolanda Putri, <sup>2</sup>Yulia Asyiwati

<sup>1,2</sup>Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota,, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: <sup>1</sup>yoppiyolandaputri@gmail.com, <sup>2</sup>jully.asyiwati89@gmail.com

**Abstract.** Undang-Undang No 06 tahun 2014 has explained that the community must have active participation in the development planning process, so that the objectives of development planning can be realized for the welfare of the community. Community participation is influenced by the level of income, livelihood, and level of education of the community. Likewise with the Ketapang Indah Village, Singkil Utara District, so far the village development planning process has involved the community since the beginning of the activity. However, the level of community involvement in the process is still not optimal, because the people involved here are only a small group of people. This study uses qualitative descriptive analysis. The results of the study stated that the level of community participation in Ketapang Indah Village was at the level of therapy participation, Informing participation, and was more dominant in participation consultation. The community provided information and proposals during the pre-musrenbangdes led by adat leaders (Ninik Mamak) and community leaders, where the information and proposals would be delivered at the village musrenbang. The community was not prevented from participating and was even given access to participate, but those involved in discussions at the village musrenbang forum with the government were community leaders. So that even though the community participates, their involvement in the process is still low. The strong paternalistic culture makes the community place leaders (traditional leaders and community leaders) as the most dominant parties to discuss with the government. Here too, the decision is also made by the government, because the final decision is with the government. Recommendations are given to improve community participation in development planning by providing knowledge and teaching it to traditional leaders or community leaders regarding the Bottom-up approach, because by providing knowledge and learning, community leaders can be used as an effort to encourage community participation in mobilizing .

**Keywords: Community Participation, Planning and Village Development**

**Abstrak.** Undang-undang No 6 tahun 2014 sudah menjelaskan bahwa masyarakat harus mempunyai partisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan, agar tujuan perencanaan pembangunan dapat terwujud untuk kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat penghasilan, mata pencaharian, dan tingkat pendidikan masyarakat. Demikian juga halnya dengan Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara, selama ini proses perencanaan pembangunan desa sudah melibatkan masyarakat sejak awal kegiatan. Akan tetapi, tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut masih belum optimal, dikarenakan masyarakat yang terlibat disini hanya sekumpulan kecil masyarakat saja. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Di Desa Ketapang Indah ini berada pada tingkat partisipasi *therapy*, partisipasi *Informing*, dan lebih dominan kepada partisipasi *consultation*. Masyarakat memberikan informasi dan usulan pada saat pra musrenbangdes yang dipimpin oleh tokoh adat (Ninik Mamak) dan tokoh masyarakat, dimana informasi dan usulan tersebut akan disampaikan pada saat musrenbang desa dilaksanakan. Masyarakat tidak dihalangi berpartisipasi bahkan diberi akses untuk berpartisipasi, namun yang terlibat berdiskusi dalam forum musrenbang desa dengan pemerintah adalah pimpinan masyarakat. Sehingga walaupun masyarakat berpartisipasi tapi keterlibatan mereka pada proses tersebut masih rendah. Kuatnya budaya paternalistik membuat masyarakat menempatkan pimpinan (tokoh adat dan tokoh masyarakat) sebagai pihak yang paling dominan untuk berdiskusi dengan pemerintah. Disini terlihat juga, pengambilan keputusan juga dilakukan oleh pemerintah, karena keputusan akhir berada pada pihak pemerintah. Rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan cara Memberikan pengetahuan dan mengajarkannya kepada tokoh adat atau tokoh masyarakat mengenai *Bottom-up approach*, karena dengan memberikan pengetahuan dan pembelajaran tersebut, pimpinan masyarakat dapat digunakan sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam hal memobilisasi masa.

**Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan, dan Pembangunan desa**

## A. Pendahuluan

### Latar Belakang

Perencanaan meruokan suatu proses menentukan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapai agar dapat terwujud kondisi sesuai dengan yang diinginkan dimasa yang akan datang (Alder, 1999 dalam Taufiqurokhman 2008:3). Dengan demikian fungsi dari perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumberdaya dan pembentukan suatu sistem komunikasi sehingga dapat mengendalikan hasil rencana yang dibuat. Oleh karena itu proses perencanaan melibatkan berbagai unsur masyarakat agar rencana yang disusun tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan desa di dahului dengan kegiatan musyawarah masyarakat yang disebut juga dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 68 ayat (1) dijelaskan bahwa masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa mempunyai hak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa, menyampaikan aspirasi, saran dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan, serta pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, sehingga perencanaan pembangunan desa yang dilakukan secara *bottom up planning*. Dari UU No 6 tahun 2014 ini sudah dijelaskan bahwa masyarakat harus mempunyai partisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan, agar tujuan perencanaan pembangunan dapat terwujud untuk kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dipengaruhi oleh tingkat penghasilan, mata pencaharian masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat dan akses informasi (Afi Rafita, 2018; dan Hadi Suroso, Dkk , 2014). Demikian juga halnya dengan kegiatan perencanaan pembangunan di Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil.

Proses perencanaan pembangunan di Desa Ketapang Indah selama ini sudah melibatkan masyarakat sejak awal kegiatan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatannya. Akan tetapi, tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut masih belum optimal, dikarenakan masyarakat yang terlibat disini hanya sekumpulan kecil masyarakat saja yaitu dari 1.787 jiwa penduduk desa usia produktif atau  $\geq 20$  tahun, hanya 5,372% atau 96 orang masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang desa, terdiri dari 34 orang masyarakat yang terlibat langsung memberikan informasi lingkungan dusun mereka masing-masing dan memberikan usulan kegiatan. Pada umumnya mereka adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan  $\geq$  SMA dan dengan mata pencaharian paling dominan adalah pegawai negeri/swasta dan wiraswasta. Sedangkan 62 orang masyarakat lainnya menyetujui usulan-usulan kegiatan yang diberikan.

Terlihat bahwa mayoritas masyarakat yang hadir pada musrenbang desa dan mayoritas masyarakat usia produktif belum sepenuhnya terlibat pada proses tersebut. Selain itu, tinggi nya jumlah anggota Rumah Tangga Miskin (RTM), menyebabkan masyarakat memiliki pekerjaan ganda, masyarakat tersebut memerlukan waktu bekerja lebih lama sehingga sulit meluangkan waktu untuk menghadiri musrenbang desa. Pada

umumnya, mereka menghadiri proses pelaksanaan pembangunan jika kondisi dan waktu memungkinkan dengan memberikan bantuan tenaga, makanan dan minuman.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, masyarakat yang terlibat hanya 5,372% dari 1.787 jiwa penduduk desa usia produktif atau  $\geq 20$  tahun;

Tingkat pendidikan masyarakat masih sangat rendah; dan

Tingginya anggota Rumah Tangga Miskin (RTM).

Dari rumusan masalah diatas maka diharapkan penelitian ini dapat menjawab pertanyaan sebagai rumusan *Research Question* yang telah ditetapkan, yaitu : “Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Ketapang Indah?”

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan *research question* yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Ketapang Indah.
2. Mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Ketapang Indah.

## B. Landasan Teori

### Teori Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu (Alder, 1999 dalam Taufiqurokhman 2008:3). Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Albert Silalahi (1987) menjelaskan bahwa tujuan perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan adalah jalan atau cara untuk mengantifikasi dan merekam perubahan (*a way to anticipate and offset change*);
2. Perencanaan memberikan pengarahan (direction) kepada administrator maupun non-administrator;
3. Perencanaan juga dapat menghindari atau setidaknya memperkecil tumpang tindih dan pemborosan (wasteful) pelaksanaan aktivitas-aktivitas; dan
4. Perencanaan menetapkan tujuan dan standar yang akan digunakan untuk memudahkan pengawasan.

*Bottom-Up Planning* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan dalam menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator, dengan kata lain pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya.

Sedangkan dalam pengertian dibidang pemerintahan, *bottom-up planning* atau perencanaan dari bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator.

### **Teori Pembangunan**

Pembangunan adalah semua kegiatan masyarakat desa baik yang bersifat fisik maupun sosial dan kegiatan ini bisa berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Mengutip pendapat Bintarto bahwa pembangunan yang berlangsung dalam suatu wilayah merupakan realisasi dari suatu perencanaan. Dikatakan bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk merombak secara bertahap atau dapat juga secara tambal sulam atau dengan menciptakan yang baru. Kesemuannya ini dapat diartikan sebagai bentuk adaptasi antara manusia dengan lingkungan, yang akan menciptakan terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya (Siti Munawaroh (2008). Pembangunan desa sangat tergantung pada dinamika kehidupan masyarakat yang merupakan suatu usaha serta dukungan masyarakat yang tidak lepas dari program yang telah ditetapkan.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Pembangunan desa ditujukan pada usaha percepatan pembangunan disegala bidang dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan hasrat untuk menciptakan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Dalam upaya pelaksanaan pembangunan desa dapat memenuhi apa yang diinginkan, maka diperlukan suatu perencanaan. Penerapan rencana pembangunan harus

bersumber pada prinsip-prinsip dasar pembangunan daerah yaitu dari masyarakat, oleh, dan untuk masyarakat desa itu sendiri.

### **Partisipasi Masyarakat**

Dwight V King (dalam Nina Noviyanti, 2010;17), mengemukakan bahwa konsep partisipasi digambarkan sebagai keikutsertaan rakyat atau masyarakat tertentu dalam mensukseskan program-program pemerintah. Partisipasi masyarakat berarti keterlibatan masyarakat dalam hal proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, dan menunjukkan tujuan serta prioritas. Pendekatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan melalui 3 tahap yakni partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil (Slamet; 1994:23). Adapun uraian mengenai tahapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam perencanaan (idea planning stage) : Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak untuk berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat. Dalam proses ini meliputi menerima dan memberi informasi, gagasan, tanggapan, saran ataupun menerima dengan syarat dan merencanakan pembangunan;
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (implementation stage) : Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk

tenaga, uang, waktu dan lain sebagainya; dan

3. Partisipasi dalam pemanfaatan (utilization stage) : Partisipasi dalam pemanfaatan adalah memetik hasil atau pemanfaatan hasil pembangunan tersebut.

Masyarakat yang tinggal dalam lingkungan desa dengan wilayah tertinggal mempunyai beberapa aspek internal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Aspek-aspek internal masyarakat menurut Asy'ari (1993) dalam Afi Rafita (2018:27) yang dimaksud antara lain :

1. Tingkat Penghasilan : Tingkat penghasilan penduduk yang relatif rendah menjadikan masyarakat memerlukan waktu bekerja yang lebih lama agar dapat meningkatkan penghasilan rata-ratanya. Hal tersebut yang menjadikan partisipasi masyarakat tidak optimal. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat dalam pembangunan di lingkungan permukimannya akan menggerakkan suatu partisipasi masyarakat, meskipun partisipasi dana dalam jumlah besar tidak dapat diharapkan.
2. Mata Pencarian : Pekerjaan sangat berkaitan dengan tingkat penghasilan masyarakat. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di desa dengan wilayah yang masuk kategori tertinggal dengan pekerjaan ganda yaitu bekerja sebagai petani, nelayan atau buruh tani. Pekerjaan tersebut secara empiris tidak dapat memberikan tingkat penghasilan yang besar. Selain itu, jenis pekerjaan juga dapat berpengaruh pada pola waktu yang dapat diberikan untuk berpartisipasi dalam

pembangunan desa.

3. Tingkat Pendidikan : Tingkat pendidikan sebagian masyarakat yang tinggal di Desa Ketapang Indah adalah rendah (pada tingkat SD atau SLTP). Hanya beberapa yang melanjutkan ke jenjang SMA dan perguruan tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi kemampuan penduduk dalam pembangunan desa, dengan kemampuan tinggi akan dapat ikut berperan mulai dalam tahap perencanaan sampai tahap pengembangan, sementara penduduk dengan kemampuan rendah hanya akan dapat berperan pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan.
4. Akses Informasi : Rendahnya tingkat pendidikan dan penghasilan akan berdampak, baik langsung maupun tidak langsung, pada kemampuan masyarakat mengakses informasi. Semakin mudah informasi diakses masyarakat, maka semakin mudah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

### **Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Menurut Kokon Subrata (dalam Widi Astuti, 2008:13), bentuk partisipasi terdiri dari beberapa hal yaitu :

1. Turut serta memberikan sumbangan finansial, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan, minuman dan sebagainya;
2. Turut serta memberikan sumbangan kekuatan fisik/tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai

- kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya;
3. Turut serta memberikan sumbangan material, partisipasi dalam bentuk menyumbangkan barang atau harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja, bahan bangunan, dan sebagainya; dan
  4. Turut serta memberikan sumbangan moril (dukungan, saran, anjuran, nasehat, petuah, amanat, dan lain sebagainya), yang diberikan untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga wujudnya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

### **Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Menurut Sherry R Arnstein (1969) mengkategorikan partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam mempengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan. Arnstein mengilustrasikan tahapan partisipasi publik dalam 8 tingkatan mulai dari level terbawah sampai level teratas. Ahmad Khotib (2016), mencoba mengilustrasikan dan menerapkan ditataran pemerintahan desa dan masyarakatnya. Tingkatan partisipasinya adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Pasif/Manipulatif : Pemerintah Desa memilih dan mendidik sejumlah orang sebagai wakil dari masyarakat. Fungsinya, ketika mereka mengajukan berbagai program, maka para wakil masyarakat tadi harus selalu menyetujuinya. Sedangkan publik sama sekali tidak diberitahu tentang hal tersebut.
2. Partisipasi Terapi (*Therapy*) : Pemerintah Desa sedikit memberitahu kepada

masyarakat tentang beberapa programnya yang sudah disetujui oleh wakil dari masyarakat. Masyarakat hanya bisa mendengarkan.

3. Partisipasi Menginformasikan (*Informing*) : Pemerintah Desa menginformasikan macam-macam program yang akan dan sudah dilaksanakan. Namun hanya dikomunikasikan searah, masyarakat belum dapat melakukan komunikasi umpan-balik secara langsung.
4. Partisipasi Konsultasi (*Consultation*) : Pemerintah Desa dan Masyarakat berdiskusi dengan banyak elemen publik tentang berbagai agenda. Semua saran dan kritik didengarkan. Tetapi mereka yang kuasa memutuskan, apakah saran dan kritik dari publik dipakai atau tidak.
5. Partisipasi Perujukan (*Placation*) : Pemerintahan Desa mendengarkan dan menerima berbagai kritik dan saran yang disampaikan masyarakat, namun Pemdes tetap menjalankan pada rencana semula.
6. Partisipasi Bekerjasama (*Partnership*) : Pemerintah Desa memperlakukan publik selayaknya rekan kerja. Mereka bermitra dalam merancang dan mengimplementasi aneka kebijakan publik bersama.
7. Partisipasi Pelimpahan Kekuasaan (*Delegated Power*) : Pemerintah Desa mendelegasikan beberapa kewenangannya kepada publik. Contoh, publik punya hak veto dalam proses pengambilan keputusan.
8. Masyarakat yang Mengontrol (*Citizen Control*) : Masyarakat yang lebih mendominasi

ketimbang pemerintah. Bahkan sampai dengan mengevaluasi kinerja mereka. Partisipasi masyarakat yang ideal tercipta di level ini.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan analisis mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Ketapang Indah, yaitu :

#### Tahap Proses Perencanaan

Tahap proses perencanaan ini dibagi kedalam 2 bagian yaitu tahap pertama (persiapan) dan tahap kedua penyusunan rencana, yang akan dijelaskan berdasarkan karakteristik masyarakat perdesun sebagai berikut :

1. Pada tahap pertama (persiapan),
  - a. Persentase bentuk partisipasi paling tinggi pada tahap ini adalah Dusun 1 sebesar (25,00%) dan Dusun 4 sebesar (20,83%). Persentase bentuk partisipasi tinggi di Dusun 1 karena masyarakat dusun ini umumnya tamatan  $\geq$  SMA, memiliki pekerjaan tetap, dan pendapatan yang cukup. Hal ini berpengaruh pada tingkat pemahaman dan kemampuan penduduk untuk dapat berperan aktif dalam proses perencanaan. Sedangkan masyarakat dusun 4 memiliki akses informasi yang lebih karena faktor kedekatan dengan pemerintah desa, walaupun pendidikan dan penghasilan rendah, tetapi masyarakat dapat berkomunikasi dengan baik kepada pemerintah desa yang beberapa aparatnya merupakan warga dusun 4.

- b. Persentase bentuk partisipasi terendah berada pada dusun 2 dan dusun 3 sebesar (14,17%). Hal ini dikarenakan masyarakat dusun didominasi oleh penduduk anggota Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan tingkat pendidikan  $\leq$  SMP, menyebabkan mereka memiliki pekerjaan tidak tetap dan pekerjaan ganda. Hal tersebut menyebabkan mereka memiliki waktu untuk bekerja lebih lama agar meningkatkan pendapatan, sehingga sulit meluangkan waktu pada proses perencanaan.

Tahap Kedua (penyusunan rencana dan penetapan keputusan)

Pada tahap ini, penyusunan rencana atau penetapan prioritas pembangunan, masyarakat yang terlibat (berdiskusi) hanya masyarakat yang berpengaruh di desa seperti Kepala Desa, Tokoh Adat (Ninik Mamak), dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan, masyarakat yang lainnya hanya ikut menyetujui usulan yang diberikan. Pengambilan keputusan juga dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dan sekaligus membahas kegiatan pembangunan mana yang akan dilaksanakan kegiatannya. Pada tahap ini mayoritas masyarakat sangat kurang berpartisipasi dan tidak memiliki andil penuh dalam penentuan keputusan, karena keputusan akhir perencanaan diputuskan oleh pemerintah.

#### Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan pembangunan sebenarnya bersifat memberdayakan masyarakat, masyarakat dapat berpartisipasi sesuai kemampuan, bisa dalam bentuk uang,

tenaga/kerja, material (bahan bangunan), makanan dan minuman sebagai salah satu wujud partisipasi pada kegiatan tersebut.

1. Dusun 1, masyarakat dusun ini lebih dominan berpartisipasi dalam proses perencanaan, sehingga pada tahap pelaksanaan mereka berpartisipasi bentuk uang sebesar (5,0%), material bahan bangunan (5,8%), makanan dan minuman (5,0%). Sedangkan dalam bentuk bantuan tenaga, sebagian besar masyarakat mengupahkannya kepada warga anggota RTM agar dapat meningkatkan pendapatan mereka, meskipun kegiatan pelaksanaan bersifat kerja bakti.
2. Dusun 2 dan Dusun 3, masyarakatnya lebih berpartisipasi dalam bentuk tenaga/kerja, karena mayoritas penduduk merupakan anggota RTM yang memiliki pekerjaan tidak tetap dan pekerjaan ganda. Umumnya mereka yang berpartisipasi dalam bentuk tenaga, selain karena diupah oleh pemerintah ataupun masyarakat, juga karena mereka ingin membantu jika mereka tidak ada kendala, agar pelaksanaan berjalan dengan lancar dan silaturahmi tetap terjaga.
3. Dusun 4, karakteristik masyarakat dusun ini sama seperti dusun 1 dan dusun 2, bedanya hanya sebagian besar masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk tenaga di Dusun 4 ini umumnya karena diajak oleh beberapa aparat desa yang tinggal di dusun ini untuk ikut melakukan kerja bakti, sehingga kegiatan pelaksanaan lebih kepada kerja bakti antar warga.

### Tahap Memanfaatkan Hasil

Pada dasarnya tahap ini bersifat sukarela dari masyarakat, karena belum ada petugas yang dibentuk untuk mengelola dan memelihara hasil pembangunan. Masyarakat yang paling dominan mengelola dan memelihara hasil pembangunan adalah masyarakat Dusun 1 sebesar (6,7%), masyarakat Dusun 2, dusun 3 dan Dusun 4 lebih dominan mau memelihara hasil dari pada mengelola. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting, karena akan berdampak pada kemauan mereka dalam mengelola dan memelihara hasil dari pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Hasil analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Ketapang Indah berada pada tingkat partisipasi terapi (masuk dalam kelompok *non participation*), partisipasi informing dan lebih dominan berada pada tingkat **konsultatif** (masuk dalam kelompok *tokenism*). Masyarakat diberi akses untuk berpartisipasi pada saat proses perencanaan, tapi keterlibatan mereka dalam proses tersebut masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat pada saat merencanakan desa dilaksanakan, masyarakat yang lebih dominan melakukan diskusi bersama pemerintah adalah tokoh adat dan tokoh masyarakat. Masih kuatnya budaya paternalistik menempatkan pimpinan (tokoh adat/ninik mamak dan tokoh masyarakat) sebagai pihak yang paling dominan untuk berdiskusi dengan pemerintah, sehingga masyarakat hanya menyetujui usulan-usulan yang diberikan.

### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan



beberapa hasil penelitian yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Ketapang Indah, menunjukkan bahwa keaktifan masyarakat untuk berpartisipasi masih kurang. Terlihat pada hasil analisis bahwa ada pengaruh aspek internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, yaitu mata pencaharian, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan akses informasi. Masyarakat desa ketapang indah pada saat pengambilan keputusan juga tidak terlibat aktif karena keputusan akhir berada pihak pemerintah.

#### E. Rekomendasi

4. Memberikan pengetahuan dan mengajarkannya kepada tokoh adat atau tokoh masyarakat mengenai *Bottom-up approach*, karena dengan memberikan pengetahuan dan pembelajaran tersebut, pimpinan masyarakat dapat digunakan sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam hal memobilisasi masa.
5. Agar masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan masyarakat anggota Rumah Tangga Miskin lebih berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan, sebaiknya dilakukan kegiatan perencanaan yang dapat mendukung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Memberikan kesempatan pendidikan non formal kepada masyarakat sebagai upaya penguatan modal sosial dengan pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sekaligus meningkatkan intensitas kegiatan masyarakat;
  - b. Memberdayakan masyarakat, dengan memberikan kegiatan pemberdayaan berupa “belajar sambil bekerja” agar pemberdayaan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau konsep teoritis tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mencoba atau memperoleh pengalaman melalui kegiatan secara nyata;
  - c. Pengembangan kegiatan yang menyangkut masalah sosial, ekonomi maupun budaya, bisa dilakukan dari segi edukasi, lifeskill, dll, dengan memanfaatkan lembaga masyarakat desa yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

#### Daftar Pustaka

- Arnstein, Sherry R. 1969. A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*.
- Noviyanti, Nina. 2010. *Partisipasi Masyarakat Miskin terhadap Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Munawarah, Siti. 2008. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Bantul*. Vol III, No 6, Desember 2008
- Rafita, Afi. 2018. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih Melalui Program Kota Tanpa Kumuh*

- (KOTAKU) di Kelurahan Sukapura. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Islam Bandung*
- Suroso, Hadi. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik*. Vol 17, No 1. Hal 11
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. UNS Press : Surakarta.
- Taufiqurokhman. 2008. *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jakarta Pusat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama
- Widyastuti Wibisana dkk, *Informasi Tentang Pos Pelayanan Terpadu*, Jakarta